



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI JUMAT, 12 APRIL 2013



DAFTAR ISI

Trans-Jawa	1
Tol Pandaan - Malang	2
Jalan Layang Non Tol	3
Komoditas Karet	4
Blok Mahakam	5



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Trans-Jawa Pembebasan Lahan Capai 51%	<ul style="list-style-type: none">Terdapat tiga ruas yang sangat rendah pembebasan lahannya yakni Pejangan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-SemarangPembebasan lahan ketiga ruas itu terhambat karena terjadi perubahan kepemilikan badan usaha jalan tol (BUJT) di ketiga ruas tersebutAnggaran yang sudah terserap untuk pembebasan lahan jalan tol trans-Jawa sejak 2007 sebesar Rp.4,04 triliun			Rp. 7,23 triliun		Tahap pembebasan lahan

TRANS-JAWA

Pembebasan Lahan Capai 51%

JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan pembebasan lahan untuk seluruh ruas jalan tol trans-Jawa sudah mencapai 51,40%.

Thomas Mola
redaksi@politis.co.id

Kasubdit Pengadaan Tanah Bina Marga Kementerian PU Heri Marzuki mengungkapkan keseluruhan pembebasan lahan trans-Jawa diusahakan selesai pada 2014.

Pasalnya, pembebasan lahan jalan tol tersebut masih menggunakan aturan lama yang merujuk pada Perpres No. 36 dan No. 65/2006. Sementara itu, UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum akan berlaku efektif pada 2015.

"Terdapat tiga ruas yang sangat rendah pembebasan lahannya yakni Pejangan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang," ujar Heri, Kamis (11/4).

Berdasarkan data Kementerian PU, hingga Juni 2011, lahan 10 ruas jalan tol trans-Jawa sepanjang 663 km yang akan dibebaskan tercatat 5.304 kilometer dengan progres pembebasan mencapai 40%.

► **Pembebasan lahan di tiga ruas sangat rendah.**

► **Anggaran yang terserap sejak 2007 sebesar Rp4,04 triliun.**

Progres tersebut sudah termasuk ruas Kanci-Pejangan yang sepanjang 38 km yang sudah beroperasi sejak awal 2010.

Kementerian PU mencatat anggaran yang sudah terserap untuk pembebasan lahan jalan tol trans-Jawa sejak 2007 sebesar Rp4,04 triliun. Sementara itu, untuk membebasakan tanah hingga 100%, pemerintah memproyeksikan kebutuhan dananya Rp7,23 triliun.

Heri menjelaskan pembebasan lahan ketiga ruas itu terhambat karena terjadi perubahan kepemilikan badan usaha jalan tol (BUJT) di ketiga ruas tersebut.

Menurutnya, ketiga ruas itu harus dikerjakan bersamaan agar layak secara finansial. Untuk itu, pihaknya akan memberi perhatian khusus untuk pembebasan lahan di ketiga ruas tersebut.

Sementara itu, pembebasan lahan ruas jalan tol trans-Jawa yang lain pada umumnya mencatat kemajuan berarti. Ruas Cikopo-Palimanan sepanjang 116,07 km, misalnya, pembebasan lahannya sudah 100%. Konstruksi jalan tol PT Marga Lintas Sedaya itu tengah dikerjakan.

Untuk ruas Semarang-Solo pembebasan lahan sudah mencapai 36%. Namun, jika dilihat per seksi ruas Semarang sampai Bawen, konstruksinya diharapkan rampung pada pertengahan tahun ini.

Adapun, untuk ruas Bawen-

Solo ditargetkan tahun ini dapat terbebasakan 30% dan di 2014 selesai 100%.

"Seksi I Semarang-Ungaran sudah beroperasi. Seksi II Ungaran-Bawen akan selesai pertengahan tahun ini. Sisanya kami sedang bebaskan lahan dan ditargetkan 2014 selesai," paparnya.

Selanjutnya untuk ruas Solo-Mantingan pembebasan lahan sudah mencapai 73,38% dan ruas Mantingan-Kertosono 43,27%.

Dia menjelaskan di ruas Mantingan-Kertosono terdapat tanah milik Kementerian Kehutanan seluas 125 hektare sepanjang 12 km yang siap dibebaskan.

Sekedar catatan, ruas Solo-Mantingan-Kertosono sepanjang 177 km, pemerintah membebasakan lahan dan mengerjakan konstruksi sepanjang 60 km dan sisanya dikerjakan oleh PT Solo Ngawi Jaya dan PT Ngawi Kertosono Jaya.

Sementara itu, untuk ruas Kertosono-Mojokerto pembebasan lahan sudah mencapai 84,31%. Di ruas ini seksi I (Bandar-Jombang) sudah 100% dan sudah beroperasi. Sementara itu, 3 seksi lainnya masih dibebaskan dan diharapkan dapat selesai pada tahun ini.

"Untuk ruas Mojokerto-Surabaya sudah mencapai 53,54%. Seksi IA sudah beroperasi. Sementara seksi lain akan kita kejar tahun ini," jelasnya.

SANGAT PANJANG

Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga Suharyadi mengungkapkan pembebasan lahan adalah

Progres Pembebasan Lahan Jalan Tol Trans-Jawa

Ruas	Pembebasan Lahan (%)	Kebutuhan Dana (Rp Miliar)
Cikopo-Palimanan	100	690,69
Kertosono-Mojokerto	84,31	310,15
Solo-Mantingan	73,38	1.142,72
Mojokerto-Surabaya	55,75	939,49
Mantingan-Kertosono	43,27	888,74
Semarang-Solo	36,43	1.779,98
Pejangan-Pemalang	29,89	408,19
Batang-Semarang	3,34	835,73
Pemalang-Batang	1,82	243,59



Sumber: Kementerian PU

Ilmu/Ban Senabara

pekerjaan yang sangat panjang dan memiliki beragam permasalahan mulai dari tanah wakaf, tanah kehutanan, tanah desa dan masih banyak lagi.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Danis H. Sumadilaga menjelaskan pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk pembebasan lahan. Namun di lapangan proses pem-

bebasan lahan tidak sesederhana yang dibayangkan.

"Tiap tahun kami menganggarkan sekitar Rp1 triliun dan kami targetkan terserap semuanya. Pada 2011 dana yang terserap hanya sekitar Rp500 miliar, tahun 2012 berhasil menyerap Rp800 miliar. Sementara itu, tahun ini, sudah terserap Rp4,5 miliar," ungkapnya. (Zubirza) 2



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Tol Pandaan-Malang Pembebasan Lahan Mulai April	<div>- Pembebasan tanah proyek jalan tol Pandaan-Malang, Jawa Timur akan dimulai antara April-Mei tahun ini</div> <div>- Untuk tanah yang rerkena proyek jalan tol tidak ada yang terbangun. Pemkab Malang tidak mengeluarkan izin baik lokasi untuk proyek perumahan maupun izin mendirikan bangunan</div> <div>- Kepala Bappeda Kab. Malang Nehrudin optimis proyek jalan tol Pandaan-Malang akan berjalan sesuai rencana. Pertimbangannya karena proyek tersebut sudah masuk dalam MP3EI</div>	2013	2015			

TOL PANDAAN-MALANG

Pembebasan Lahan Mulai April

MALANG—Pembebasan tanah proyek jalan tol Pandaan-Malang, Jawa Timur, akan dimulai antara April-Mei tahun ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Malang Nehrudin mengatakan mengacu jadwal, pembebasan tanah dimulai tahun ini dan pengerjaan fisiknya 2014, sedangkan pengoperasiannya pada 2015.

“Jadi kalau disebut ada pelambatan dalam pembebasan tanah, ya cuma terlambat tiga bulan. Mestinya kegiatan tersebut bisa dimulai pada awal tahun ini,” katanya, Kamis (11/4).

Menurutnya, informasi soal pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Pandaan-Malang itu diperoleh dari pimpinan proyek pembangunan jalan tol. Karena itulah dia akan mengundang pimpro proyek tersebut untuk berkoordinasi.

Yang jelas, sambung dia, untuk tanah yang terkena proyek jalan tol tidak ada yang terbangun. Pemkab Malang tidak mengeluarkan izin, baik izin lokasi untuk proyek perumahan maupun izin mendirikan bangunan untuk rumah atau pabrik.

Namun, Nehrudin mengakui, trace jalan tol Pandaan-Malang yang berada di Kab. Malang ada yang melewati kompleks perumahan, yakni Graha Kencana dan Araya. Namun, tanah yang terkena proyek jalan tol tersebut sudah disisihkan.

Dia optimistis, proyek jalan tol Pandaan-Malang akan berjalan sesuai rencana. Pertimbangannya karena proyek tersebut sudah masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Di samping itu, proyek jalan tol Pandaan-Malang masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Provisi Jawa Timur. Pembangunan jalan tol jadi prioritas dalam kegiatan tersebut.

Pertimbangan lainnya, kata Nehrudin, tidak mungkin proyek jalan tol Pandaan-Malang yang panjangnya 27 km ditinggalkan, padahal pemerintah telah merealisasikan pembangunan jalan tol lainnya seperti jalan tol Surabaya-Gempol, Gempol-Pasuruan, dan Surabaya-Mojokerto.

“Lagi pula dana untuk pembebasan tanah proyek jalan tol tersebut sebenarnya sudah ada. Tinggal pelaksanaannya saja.”

Sebelumnya, Wali Kota Malang Peni Suparto mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan tol Pandaan-Malang karena perannya yang vital bagi pengembangan industri di kota itu.

“Rencana pembangunan jalan tol Pandaan-Malang sebenarnya sudah lama, sejak 2009 lalu, namun tidak bisa segera direalisasikan karena investornya mundur sehingga proyek itu kembali ditangani pemerintah pusat,” katanya. (k24)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☐ Mar

☒ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☒ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jalan Layang Melayu-Tanah Abang	<div>- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menyatakan akan melanjutkan proyek senilai Rp.737 miliar</div> <div>- JLNT tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan sepanjang koridor Kampung Melayu-Tanah Abang dan digarap dalam 3 paket yakni paket Casablanca, Prof. Dr. Satrio dan Mas Masyur</div>			Rp.737 miliar		

JALAN LAYANG MELAYU-TANAH ABANG

Dahlan Siap Bongkar Jika Ada Kecurangan

Terhentinya pembangunan jalan layang nontol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang berbuntut panjang.

Dimas Novita S., Ahmir Anwar & Thomas Mola
redaksi@bisnis.co.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan melanjutkan proyek senilai Rp737 miliar yang pengerjaan telah berlangsung sejak November 2010, setelah adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan hati-hati dalam penggunaan anggaran terutama proyek infrastruktur termasuk penghentian sementara waktu proyek JLNT tersebut.

Dia tidak ingin dampak kesalahan penggunaan anggaran menjerumuskan Gubernur Joko Widodo ke dalam penjara. Oleh karena itu, proyek yang sempat terhenti itu tidak serta merta dilanjutkan hanya untuk mengejar penyelesaian sesuai target.

Menteri BUMN Dahlan Iskan pun angkat bicara. Selain mendukung audit terhadap proyek itu, dia mene-

gaskan tidak akan menutup-tutupi jika terjadi ketidakberesan dalam pembangunan proyek yang melibatkan tiga BUMN Karya.

"Kalau memang ada BUMN yang tidak beres, bongkar saja. Tapi proyek itu harus selesai karena sudah ditunggu masyarakat luas. Saya tidak akan tutup-tutupi. Saya tidak akan melindungi, bahkan akan ikut membongkar kalau memang ada indikasi main-main," ujar Dahlan, Selasa (23/4).

Seperti diketahui pembangunan JLNT sepanjang 2,7 kilometer itu dimaksudkan untuk mengurai kemacetan sepanjang koridor Kampung Melayu-Tanah Abang dan digarap dalam tiga paket yakni paket Casablanca, Prof. Dr. Satrio, dan Mas Masyur. Ketiga paket itu dikerjakan masing-masing oleh PT Nindya Karya, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Istaka Karya.

DITUNGGU MASYARAKAT

Dahlan menegaskan proyek itu harus selesai karena sudah ditunggu masyarakat luas. Apalagi, hanya menyisakan kurang dari 10 meter untuk tersambung.

Bagian yang belum selesai tersebut dikerjakan oleh PT Istaka Karya dan dalam kontrak, BUMN itu diberikan waktu hingga akhir Juni 2013 untuk menyelesaikan kewajibannya. Artinya, perusahaan masih memiliki waktu 1,5 bulan lagi. Untuk menyelesaikan proyek



Kendaraan melewati jalan layang nontol Blok M-Antasari yang pengerjaannya bersamaan dengan Kp. Melayu-Tanah Abang

Paket Pengerjaan Proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang

Paket	Panjang (Meter)	Kontraktor
Satrio	850	PT Nindya Karya
Casablanca	1.125	PT Wijaya Karya Tbk
Mas Masyur	725	Istaka Karya

Sumber: Pemprov DKI, dibalik

Ilustrasi/Infrastruktur

tersebut Istaka Karya harus mencari pinjaman dari pihak ketiga yaitu perbankan BUMN agar dapat menyelesaikan proyek tanpa menunggu pembayaran dari Pemprov DKI. "Saat ini Istaka Karya masih punya tagihan ke Pemprov DKI

Jakarta sekitar Rp24 miliar. Istaka mendukung kalau diadakan audit ulang agar sisa pembayaran dan kekurangan proyek bisa segera dikurikan," ujar Dahlan. Dirut Istaka Karya Kasman Muhammad menyatakan siap

melanjutkan proyek jika Pemprov DKI sudah menyediakan pendanaan. Proyek itu terhenti sementara selain karena menunggu alokasi dana melalui APBD Perubahan, juga karena pihaknya harus melakukan desain ulang untuk menghindari jalur pipa yang tertanam di jalan.

"Sejak awal Januari belum dibayar, saya tidak ingat persis angkanya. Tinggal sedikit saja selesai, tapi tergantung pemerintah DKI," ujarnya ketika dihubungi *Bisnis*.

Istaka Karya mengerjakan paket yang saat ini belum selesai yakni Mas Masyur.

Selain itu, Dahlan mengungkapkan PT Wijaya Karya Tbk sudah menyelesaikan bagiannya dan tidak punya tagihan ke Pemprov DKI. "Dalam proyek tersebut, Wika telah memberikan penghematan sebesar

Rp53 miliar. Dalam kasus jalan layang nontol ini, Wika mengembalikan seluruh Rp53 miliar kepada Pemda DKI," ungkapnya.

Adapun, manajemen PT Nindya Karya mengatakan masih ada pembayaran pengerjaan yang belum diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pemimpin Proyek Nindya Karya Seno Susanto menuturkan pembayaran dari Pemprov DKI Jakarta belum tuntas. Pemprov baru membayar Rp55 miliar kepada perseroan.

"Kurang Rp50 juta lagi, harusnya kami sudah dapat Januari kemarin, ketika pengerjaan paket selesai."

Adapun proyek yang dikerjakan oleh Nindya Karya yakni dari on-off ramp Karet Bivak hingga Casablanca sepanjang 850 meter dengan nilai kontrak Rp60 miliar sudah selesai Sejak Januari lalu. (putra)

► Pemprov DKI tak ingin terjerumus.

► Istaka Karya masih punya tagihan ke DKI.

► Wijaya Karya menghemat Rp53 miliar.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Gejolak Komoditas Harga Karet Petani di Sumatera Selatan Anjlok	<ul style="list-style-type: none">- Harga karet dipengaruhi oleh kondisi perdagangan global- Malaysia sudah mulai melepas stok karetnya sehingga terjadi penumpukan komoditas di pasar internasional- Saat harga karet anjlok, petani yang paling terkena dampak harga untuk hasil kebun mereka- Kalangan petani berharap pemerintah bisa mengambil solusi yang bijak terhadap masalah ekspor karet, sehingga semua pihak termasuk petani tidak dirugikan					

▶ GEJOLAK KOMODITAS

Harga Karet Petani di Sumatra Selatan Anjlok

PALEMBANG—Harga karet di tingkat petani Sumatra Selatan mengalami penurunan karena stok produksi yang melimpah dan dampak pembebasan ekspor oleh ketiga negara penghasil karet dunia.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sumsel Benyamin mengatakan penurunan harga karet memang dipengaruhi oleh kondisi perdagangan global.

Malaysia sudah mulai melepas stok karetnya sehingga terjadi penumpukan komoditas di pasar internasional. Di tingkat petani sendiri memang produksi seperti ini sedang meningkat, katanya saat dihubungi *Bisnis*, Senin

(22/4).

Menurut Benyamin, saat harga karet anjlok, petani yang paling terkena dampak karena tidak ada perlindungan harga untuk hasil kebun mereka.

Berdasarkan data hasil lelang KUD Serasan Jaya per 15 April 2013, harga tertinggi untuk slab 2 mingguan sebesar Rp12.059 per kg.

Ketika *Bisnis* mengonfirmasi perkembangan harga di tingkat petani, koperasi petani karet rakyat itu menyampaikan harga sudah anjlok menjadi Rp10.000 per kg pada Senin, kemarin.

RESI GUDANG

Benyamin mengatakan sudah

seharusnya digalakkan sistem resi gudang untuk petani karet sehingga petani memiliki jaminan serta daya tawar saat harga anjlok.

Dia mengatakan dengan sistem ini petani dapat menunda penjualan komoditas setelah panen, sambil menunggu harga membaik.

"Akan tetapi, sayangnya belum ada keberpihakan kepada petani dari kalangan industri perbankan. Petani karet di Sumsel ini mayoritas petani rakyat dan individu sehingga perbankan kurang melirik mereka. Berbeda dengan sawit yang dikelola oleh perusahaan besar," jelasnya.

Ketua KUD Serasan Jaya Kabupaten Muara Enim Sumsel Ahmad Mantap mengatakan harga

karet sudah menunjukkan penurunan sejak awal April lalu.

"Harga mulai turun sejak awal bulan dan sepertinya akan terus bergerak turun karena stok barang di luar sedang banyak," katanya.

Kalangan petani karet berharap pemerintah bisa mengambil solusi yang bijak terhadap masalah ekspor karet sehingga semua pihak, termasuk petani, tidak dirugikan.

Seperti diketahui, tiga negara produsen karet dunia, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia batal membicarakan kelanjutan program pembatasan ekspor karet dalam sidang International Tripartite Rubber Council (ITRC)

di Phuket, Thailand, beberapa waktu lalu.

Indonesia sendiri berencana mengusulkan untuk tidak melanjutkan program *agreed export tonnage scheme* (AETS).

Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa perpanjangan implementasi AETS akan dibahas pada sidang IRTC pada Mei 2013 di Palembang, Sumsel.

Sesuai komitmen yang berlaku pada Oktober 2012, selama enam bulan itu Indonesia harus memangkas ekspor karet sebanyak 117.000 ton. Adapun, Sumsel sebagai penghasil karet terbesar di Tanah Air telah membatasi ekspor sebanyak 22.000 ton. (Dinda Wulandari)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas ☐ Media Indonesia ☐ Koran Tempo ☒ Bisnis Indonesia
☐ Republika ☐ Sinar Harapan ☐ Suara Pembaruan ☐ Pikiran Rakyat
☐ Rakyat Merdeka ☐ Seputar Indonesia ☐ Investor Daily ☐ Kontan ☐ Lain-lain,
☐ Suara Karya ☐ Neraca ☐ Jurnal Nasional ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Polemik Blok Mahakam Dahlan Dukung Pertamina	<ul style="list-style-type: none">- Dahlan Optimis Pertamina sanggup mengelola blok yang masa kontraknya bersama PT. Tota E&P Indonesia akan habis pada 2017- Kesanggupan Pertamina bisa dilihat pada saat mengambil alih pengelolaan Blok West , Madura Offshore dari Kodeco- Dengan dikelolanya Blok Mahakam oleh Pertamina, diperkirakan perseroan memperoleh keuntungan hingga Rp.120 triliun				Pertamina	

► POLEMIK BLOK MAHAKAM

Dahlan Dukung Pertamina

JAKARTA—Meskipun Menteri BUMN Dahlan Iskan menjamin dan mendukung PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Blok Mahakam 100% pada 2017, Kementerian ESDM belum berani memutuskannya.

Lili Sunardi & Riendy Astria
redaksi@bisnis.co.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menegaskan persoalan itu masih terus dikaji, karena pemerintah menginginkan kontrak baru pengelola selesai sebelum masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 berakhir pada 2014.

Dia juga meminta Pertamina untuk memaparkan kemampuannya dalam mengelola blok migas tersebut, termasuk di hadapan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

"Setelah itu, kami akan putuskan opsi yang terbaik, ini akan kami bahas," ujarnya, Rabu (3/4).

Pada kesempatan terpisah, Dahlan justru optimis Pertamina sanggup mengelola blok yang masa kontraknya bersama PT Total E&P Indonesia akan habis pada 2017. Hal senada juga dinyatakannya Wapres Jusuf Kalla.

Menurut Dahlan, pekerjaan rumah Pertamina adalah mencari pendanaan untuk berinvestasi di

blok tersebut dalam bentuk pinjaman, *global bond* atau skema lainnya, karena pemerintah tidak akan mengucurkan dana bantuan.

Dahlan memang belum bertemu dengan Jero Wacik untuk membicarakan hal ini tetapi Pertamina menyatakan sanggup sebagai pengelola. "Namun tetap keputusan bulat ada di tangan pemerintah [secara keseluruhan]."

Kesanggupan Pertamina bisa dilihat pada saat mengambil alih pengelolaan Blok West Madura Offshore dari Kodeco. Ketika itu, produksi WMO masih berada di bawah 10.000 barel per hari. Namun, setelah diambil alih Pertamina, produksi terus naik.

Saat ini sudah hampir 20.000 barel per hari, bahkan ditargetkan sampai 30.000 barel per hari.

Begitu juga dengan produksi Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang terus meningkat dan pernah menyentuh 40.000 barel per hari.

Intinya, kata Dahlan, Pertamina akan mampu mengelola Blok Mahakam bila diberi kesempatan oleh pemerintah. "Itu nanti Pak Jero Wacik yang mengumumkan, karena ini memang domain beliau."

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Munkid optimis perseroan memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi di Blok Mahakam pada 2017. Apalagi, jelasnya, lapangan pro-

Menanti Nasib Blok Mahakam

Nasib Blok Mahakam segera ditentukan dalam tahun ini. Namun, penentuan nasib blok yang terletak di Kalimantan Timur masih alot. Bahkan, di tingkat pemerintah masih terjadi tarik menarik bermuatan kepentingan dalam menentukan nasib blok tersebut.

Profil Blok Mahakam

- Tanda tangan kontrak pertama kali 31 Maret 1967
- Cadangan yang telah dieksploitasi 13,5 Triliun kaki kubik (Tcf)
- Sisa cadangan 5,7 Triliun Kaki kubik (Tcf)

Produksi hingga 2011

Hasil gas: 2.200 MMscfd
Hasil minyak: 93.000 barel per hari

Bagi Hasil :

Penerimaan negara Rp63 triliun
Cost recovery Rp21 triliun
Share contractor Rp22 triliun
(Total dan Inpeks)

Kat : Gross revenue oil, condensate and gas dari versi Total E&P Indonesia

Total Pendapatan
Rp106 triliun*

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah

Bisnis/PTN/Bum Perantara

duksi bukan menjadi momok, karena di saat yang sama juga menghasilkan pendapatan.

Menurut dia, dengan dikelolanya Blok Mahakam oleh Pertamina, diperkirakan perseroan memperoleh keuntungan hingga Rp120 triliun pada 2018 yang mencakup seluruh kinerja dari hulu ke hilir, belum termasuk pendapatan dari blok tersebut.

Adapun bagian kontrak diproyeksikan Rp15 triliun per tahun.

"Keuntungan Rp120 triliun itu salah satunya akan ditopang dari pen-

ingkatan bisnis petrokimia serta proyek akuisisi."

Sebagai gambaran, Head Department of Media Relations Total E&P Indonesia Kristanto Hartadi mengatakan perseroan mengeluarkan US\$2,3 miliar setiap tahun untuk menggarap Blok Mahakam. Pada masa datang, Total menyiapkan investasi sedikitnya US\$17,3 miliar. ■

► Pemerintah tak akan kururkan dana bantuan bagi Pertamina.

► Penggarapan Blok Mahakam menelan dana US\$2,3 miliar per tahun.